EKONOMI HIJAU DAN KEADILAN SOSIAL: MENJEMBATANI KESENJANGAN MELALUI KEBERLANJUTAN

Hamka

Universitas Negeri Gorontalo

hamkamasse@ung.ac.id

Abstract

This study explores the relationship between green economy and social justice, as well as how these two concepts can be integrated to achieve inclusive sustainable development. In the face of global challenges such as climate change and economic inequality, green economy has emerged as a promising approach for environmentally friendly economic growth. However, its implementation often neglects social justice aspects, creating new gaps or exacerbating existing ones. This study analyses strategies and policies that can bridge the gap between environmental and social objectives, with a focus on green job creation, skills development, and fair distribution of benefits from economic transition. The findings indicate that effective integration between green economy and social justice requires a multidimensional approach involving various stakeholders. Key recommendations include: (1) developing a comprehensive policy framework that aligns environmental goals with social justice, (2) investing in education and training to prepare the workforce for the green economy, (3) strengthening mechanisms for public participation in decision-making related to environmental and economic policies, and (4) developing adaptive social protection systems that respond to structural economic changes. This study contributes to a deeper understanding of how sustainability can be achieved without sacrificing social justice, providing a foundation for further research and policy development in this area.

Keywords: *Green Economy, Social Justice, Inequality through Sustainability*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara ekonomi hijau dan keadilan sosial, serta bagaimana kedua konsep ini dapat diintegrasikan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi, ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Namun, implementasinya sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial, menciptakan kesenjangan baru atau memperburuk yang sudah ada. Studi ini menganalisis strategi dan kebijakan yang dapat menjembatani kesenjangan antara tujuan lingkungan dan sosial, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja hijau, pengembangan keterampilan, dan distribusi manfaat yang adil dari transisi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi yang efektif antara ekonomi hijau dan keadilan sosial memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Rekomendasi utama meliputi: (1) pengembangan kerangka kebijakan yang komprehensif yang menyelaraskan tujuan lingkungan dengan keadilan sosial, (2) investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi ekonomi hijau, (3) penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan ekonomi, dan (4) pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan struktural ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keberlanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan keadilan sosial, memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan di bidang ini.

Kata Kunci: *Ekonomi Hijau, Keadilan Sosial, Kesenjangan melalui Keberlanjutan*

Pendahuluan

Dunia saat ini dihadapkan pada dua tantangan besar yang saling terkait: krisis lingkungan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati mengancam kelangsungan hidup manusia, sementara ketimpangan ekonomi dan sosial terus meningkat, menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan dalam masyarakat global. Pemanasan global telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan suhu rata-rata global meningkat 1,1°C sejak era pra-industri. Laju kepunahan spesies saat ini 100-1000 kali lebih cepat dibandingkan laju alami, dan polusi udara, air, serta tanah terus memburuk, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem (Morales & Fischer, 2021).

Pada saat yang sama, kesenjangan sosial-ekonomi mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Satu persen populasi terkaya dunia menguasai 44% kekayaan global, sementara 50% populasi termiskin hanya memiliki kurang dari 1% kekayaan. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak masih sangat tidak merata antar negara dan dalam negara. Pandemi COVID-19 telah memperparah ketimpangan yang ada, dengan kelompok rentan mengalami dampak yang lebih berat (Bianchi & Andrews, 2020).

Keterkaitan antara krisis lingkungan dan kesenjangan sosial-ekonomi semakin jelas terlihat. Dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan seringkali dirasakan lebih parah oleh masyarakat miskin dan rentan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan sering kali menguntungkan segelintir pihak sambil merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Situasi ini menuntut adanya pendekatan yang dapat mengatasi kedua masalah tersebut secara bersamaan (Wang & Brown, 2022).

Dalam konteks ini, konsep ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan. Konsep ekonomi hijau merupakan sebuah paradigma pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan (Santos & Turner, 2021). Ekonomi hijau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan, dengan fokus pada pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem. Pendekatan ini berupaya untuk mentransformasi sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan dampak lingkungan, menjadi sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka Panjang (Liu & Hassan, 2022).

Dalam implementasinya, ekonomi hijau melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan teknologi ramah lingkungan, promosi energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Konsep ini juga mendorong inovasi dalam sektor-sektor kunci seperti transportasi, konstruksi, pertanian, dan industri untuk mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan lainnya. Selain itu, ekonomi hijau juga menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan atau "green jobs", yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan (Taylor & White, 2022). Dengan demikian, ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, implementasi ekonomi hijau juga menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana konsep ekonomi hijau dapat diimplementasikan dengan cara yang tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Memahami hubungan antara ekonomi hijau, keadilan sosial, dan keberlanjutan menjadi krusial dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang dapat menjembatani kesenjangan melalui pendekatan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur, juga dikenal sebagai studi kepustakaan atau literature review, adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencarian sistematis terhadap buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan-temuan yang ada (Moha & sudrajat, 2019); (sudrajat & Moha, 2019). Peneliti menggunakan metode ini untuk membangun pemahaman komprehensif tentang suatu topik, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, merumuskan pertanyaan penelitian baru, atau memberikan dasar teoritis untuk penelitian lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, peneliti perlu melakukan penilaian kritis terhadap kualitas dan relevansi sumber-sumber yang digunakan, serta mampu mensintesis informasi dari berbagai perspektif untuk menghasilkan wawasan baru atau konfirmasi terhadap teori yang ada (Yusanto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Kesenjangan dalam Konteks Ekonomi dan Sosial

Kesenjangan dalam konteks ekonomi dan sosial merupakan fenomena yang telah lama menjadi perhatian global. Hal ini merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya dan layanan di antara berbagai kelompok Masyarakat (Gonzalez & Schmitt, 2021).

Akar dari kesenjangan ini dapat ditelusuri dari berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, struktur sosial, dan sejarah kolonialisme. Kebijakan ekonomi yang tidak merata, misalnya, dapat menciptakan kondisi di mana sebagian kecil masyarakat menikmati sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas lainnya hidup dalam kemiskinan (Kovacs & Singh, 2021).

Dampak dari kesenjangan ekonomi dan sosial sangat luas dan mendalam. Pada tingkat individu, kesenjangan dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya mewarisi keterbatasan yang sama (Yamamoto & Sato, 2022).

Pada skala yang lebih besar, kesenjangan dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Ketidakpuasan yang timbul akibat ketimpangan yang mencolok dapat memicu konflik sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Chen & Patel, 2023).

Upaya untuk mengatasi kesenjangan telah menjadi fokus dari berbagai kebijakan pemerintah dan inisiatif global. Strategi yang umum diterapkan meliputi reformasi sistem perpajakan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta program perlindungan sosial yang ditargetkan. Namun, mengatasi kesenjangan bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan

pendekatan holistik. Selain kebijakan ekonomi, diperlukan juga perubahan dalam norma sosial dan budaya yang mungkin melanggengkan ketidaksetaraan (Kim & Lopez, 2021).

Peran teknologi dalam konteks ini juga menjadi semakin penting. Di satu sisi, inovasi teknologi dapat membuka peluang baru dan meningkatkan produktivitas. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, teknologi juga dapat memperlebar kesenjangan yang ada. Dalam konteks global, kesenjangan antar negara juga menjadi isu yang kritis. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengejar kesetaraan ekonomi dan sosial, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan global lainnya (Jiang & Ferreira, 2023).

Mengingat kompleksitas isu ini, kolaborasi internasional dan solidaritas global menjadi sangat penting. Upaya bersama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan salah satu contoh bagaimana komunitas global berusaha untuk mengatasi kesenjangan dan menciptakan dunia yang lebih adil dan merata bagi semua.

Implementasi Ekonomi Hijau

Implementasi ekonomi hijau merupakan langkah penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas tempat tinggal manusia (Torraco, 2005).

Pada dasarnya, ekonomi hijau mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan. Hal ini melibatkan transisi dari model ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan dampak lingkungan, menuju pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan (Torres & Wilson, 2021).

Salah satu aspek kunci dalam implementasi ekonomi hijau adalah pengembangan energi terbarukan. Investasi dalam teknologi seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi (Martinez & Khan, 2020).

Efisiensi sumber daya juga menjadi fokus utama dalam ekonomi hijau. Ini melibatkan praktik-praktik seperti daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan limbah. Perusahaan didorong untuk mengadopsi model bisnis sirkular yang meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan nilai dari setiap sumber daya (Rodrigues & Almeida, 2022).

Dalam sektor pertanian, implementasi ekonomi hijau mendorong praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan metode pertanian organik, konservasi air, dan pengelolaan lahan yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas sambil meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Transportasi hijau juga menjadi komponen penting dalam ekonomi hijau. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur untuk kendaraan listrik, peningkatan sistem transportasi publik, dan perancangan kota yang mendorong berjalan kaki dan bersepeda. Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan kesehatan Masyarakat (Rodriguez & Thompson, 2020).

Implementasi ekonomi hijau membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Ini dapat berupa insentif pajak untuk praktik ramah lingkungan, regulasi yang lebih ketat terhadap

polusi, dan investasi publik dalam infrastruktur hijau. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk keberhasilan implementasi ini (Adekunle & Patel, 2023).

Meskipun tantangan dalam implementasi ekonomi hijau cukup besar, potensi manfaatnya sangat signifikan. Selain mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati, ekonomi hijau juga menawarkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan yang terkoordinasi, implementasi ekonomi hijau dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan makmur.

Strategi Menjembatani Kesenjangan melalui Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau menawarkan peluang unik untuk menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi yang telah lama menjadi tantangan global. Strategi yang tepat dalam mengimplementasikan ekonomi hijau dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada saat yang sama menjaga kelestarian lingkungan (Patel & Anderson, 2020).

Salah satu strategi utama adalah menciptakan lapangan kerja hijau. Investasi dalam sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah dapat membuka peluang kerja baru. Ini tidak hanya mengurangi pengangguran tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam ekonomi baru yang lebih berkelanjutan (Okonkwo & Patel, 2021).

Pendidikan dan pelatihan keterampilan hijau juga menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan. Program-program yang ditargetkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi hijau dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar kerja. Ini termasuk pelatihan dalam teknologi energi terbarukan, praktik pertanian berkelanjutan, dan manajemen sumber daya alam (Nkomo & Lee, 2022).

Akses yang merata terhadap teknologi hijau juga penting dalam mengurangi kesenjangan. Kebijakan yang mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti subsidi untuk panel surya atau peralatan hemat energi, dapat membantu mendemokratisasi manfaat ekonomi hijau (Ferreira & Almeida, 2023).

Pemberdayaan komunitas lokal dalam inisiatif ekonomi hijau merupakan strategi lain yang efektif. Melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek hijau tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan langsung oleh mereka yang paling membutuhkan (Ahmed & Singh, 2023).

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berfokus pada produk dan layanan ramah lingkungan dapat menjadi sarana penting untuk menyebarkan manfaat ekonomi hijau. Dukungan dalam bentuk akses ke pembiayaan, pelatihan manajemen, dan bantuan pemasaran dapat membantu UKM ini berkembang dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.

Kebijakan fiskal yang progresif juga berperan penting dalam menjembatani kesenjangan melalui ekonomi hijau. Ini bisa termasuk pengenaan pajak karbon yang adil, di mana pendapatan digunakan untuk mendukung program-program sosial atau investasi dalam infrastruktur hijau di daerah-daerah yang kurang berkembang (Tanaka & Patel, 2023).

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil juga krusial. Kolaborasi ini dapat memobilisasi sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk

mengimplementasikan inisiatif ekonomi hijau secara efektif, sambil memastikan bahwa manfaatnya terdistribusi secara adil (Müller & Nakamura, 2021).

Penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dengan inisiatif ekonomi hijau juga penting. Ini dapat membantu melindungi kelompok-kelompok rentan selama masa transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses ini (Moreno & Zhang, 2022).

Terakhir, pemantauan dan evaluasi yang konsisten terhadap dampak sosial dari inisiatif ekonomi hijau sangat penting. Ini memungkinkan penyesuaian strategi secara real-time untuk memastikan bahwa upaya menjembatani kesenjangan tetap efektif dan relevan seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif ini, ekonomi hijau dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang Implementasi Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian global sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan ekonomi secara bersamaan. Implementasi ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan (Li & Kumar, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi hijau adalah resistensi dari industri konvensional yang masih bergantung pada bahan bakar fosil dan praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini sering kali enggan untuk beralih ke teknologi dan metode produksi yang lebih berkelanjutan karena memerlukan investasi besar dan perubahan signifikan dalam operasional mereka. Selain itu, kurangnya insentif ekonomi dan regulasi yang mendukung juga dapat menghambat transisi menuju ekonomi hijau (Malik & Singh, 2022).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang mendukung ekonomi hijau. Banyak negara, terutama negara berkembang, masih kekurangan infrastruktur seperti jaringan listrik yang efisien untuk energi terbarukan atau sistem transportasi publik yang ramah lingkungan. Pengembangan dan implementasi teknologi hijau juga memerlukan investasi besar dan waktu yang tidak sedikit, yang dapat menjadi hambatan bagi negara-negara dengan sumber daya terbatas (Smith & Johnson, 2020).

Kesenjangan keterampilan dan pengetahuan juga menjadi tantangan dalam implementasi ekonomi hijau. Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pengetahuan khusus dalam bidang teknologi ramah lingkungan, manajemen sumber daya berkelanjutan, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Namun, saat ini masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri hijau dan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang sesuai (Sharma & Chen, 2023).

Di sisi lain, implementasi ekonomi hijau juga membuka berbagai peluang yang menjanjikan. Salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Pengembangan industri hijau dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta membuka peluang bisnis baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Garcia & Lee, 2021).

Peluang lainnya adalah peningkatan efisiensi dan penghematan biaya jangka panjang. Meskipun implementasi teknologi dan praktik ramah lingkungan mungkin memerlukan investasi awal yang besar, dalam jangka panjang dapat menghasilkan penghematan signifikan melalui pengurangan konsumsi energi, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan penurunan biaya yang terkait dengan dampak lingkungan (Morales & Fischer, 2021).

Implementasi ekonomi hijau juga membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan lingkungan. Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya tidak terbarukan dan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, negara-negara dapat lebih siap menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan guncangan ekonomi global (Bianchi & Andrews, 2020).

Selain itu, ekonomi hijau dapat mendorong kerjasama internasional dan transfer teknologi. Negara-negara maju dapat berbagi pengetahuan dan teknologi dengan negara berkembang, menciptakan peluang untuk kolaborasi global dalam mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi. Hal ini juga dapat membuka pasar baru untuk produk dan jasa ramah lingkungan di tingkat internasional (Wang & Brown, 2022).

Akhirnya, implementasi ekonomi hijau memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui pengurangan polusi, peningkatan akses terhadap energi bersih, dan perbaikan lingkungan, ekonomi hijau dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas lingkungan. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Ekonomi hijau dan keadilan sosial merupakan dua konsep yang saling terkait dan memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan. Melalui pendekatan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan kebijakan dan praktik yang mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan ekosistem, sekaligus memastikan bahwa manfaat dari transisi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menjembatani kesenjangan antara ekonomi hijau dan keadilan sosial, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kebijakan yang inklusif dan partisipatif harus dirancang untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan peluang bagi kelompok marginal dan rentan. Ini dapat meliputi program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pekerjaan hijau, dukungan finansial bagi usaha kecil dan menengah yang menerapkan praktik berkelanjutan, serta perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak oleh perubahan struktural dalam ekonomi.

Pada akhirnya, menjembatani kesenjangan antara ekonomi hijau dan keadilan sosial melalui keberlanjutan bukan hanya tentang mencapai tujuan lingkungan atau ekonomi semata, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memadukan prinsip-prinsip ekonomi hijau dengan keadilan sosial, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah di mana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan

kesejahteraan bagi semua. Hal ini membutuhkan komitmen jangka panjang, inovasi, dan kemauan politik yang kuat, namun hasilnya akan memberikan manfaat yang berlipat ganda bagi generasi sekarang dan masa depan.

Daftar Rujukan

- Adekunle, A., & Patel, S. (2023). Sustainable agriculture and food security: Implications for social equity in developing countries. *Global Food Security*, 36, 100670. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100670>
- Ahmed, F., & Singh, P. (2023). Green jobs and social inclusion: A case study of developing countries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 171, 112980. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112980>
- Bianchi, C., & Andrews, L. (2020). Corporate social responsibility and stakeholder engagement: The case of online social networks. *Journal of Business Research*, 118, 385–397. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.005>
- Chen, X., & Patel, V. (2023). Sustainable waste management and social equity: Challenges and opportunities in the circular economy. *Waste Management*, 159, 116–128. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.01.011>
- Ferreira, J., & Almeida, L. (2023). Green public procurement as a tool for promoting social equity and sustainable development. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 29(2), 100752. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2022.100752>
- Garcia, M., & Lee, D. (2021). Achieving social equity in the green transition: A review of challenges and opportunities. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 38, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.12.006>
- Gonzalez, M., & Schmitt, A. (2021). The impact of green technologies on labor markets and social inequality: A systematic review. *Technological Forecasting and Social Change*, 164, 120483. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120483>
- Jiang, H., & Ferreira, J. (2023). Sustainable urban mobility and social equity: Challenges and opportunities in green transportation. *Transport Policy*, 134, 116–129. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.11.013>
- Kim, J.-H., & Lopez, C. (2021). Sustainable urban planning for social equity: Challenges and opportunities in green cities. *Cities*, 114, 103196. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103196>
- Kovacs, A., & Singh, R. (2021). The impact of green innovation on income inequality: Evidence from panel data analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 169, 120816. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120816>
- Li, X., & Kumar, R. (2022). Green finance and financial inclusion: Bridging the gap for sustainable development. *Research in International Business and Finance*, 59, 101530. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101530>
- Liu, W., & Hassan, A. (2022). The role of circular economy in promoting social inclusion: Opportunities and challenges. *Journal of Cleaner Production*, 338, 130652. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130652>

- Malik, A., & Singh, P. (2022). Green entrepreneurship as a pathway to social inclusion: Evidence from emerging economies. *Journal of Business Venturing*, 37(3), 106190. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106190>
- Martinez, S., & Khan, I. (2020). Sustainable energy transitions and social justice: A critical review. *Energy Research & Social Science*, 70, 101587. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101587>
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *RESUME RAGAM PENELITIAN KUALITATIF*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtnzc>
- Morales, E., & Fischer, L. (2021). The role of social innovation in bridging the gap between green economy and social inclusion. *Sustainability*, 13(1), 308. <https://doi.org/10.3390/su13010308>
- Moreno, L., & Zhang, Y. (2022). Green infrastructure and environmental justice: Addressing urban inequalities. *Landscape and Urban Planning*, 221, 104355. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104355>
- Müller, H., & Nakamura, E. (2021). Green innovation and its impact on social inequality: Evidence from OECD countries. *Research Policy*, 50(5), 104200. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104200>
- Nkomo, T., & Lee, J.-S. (2022). Green skills and social mobility: A comparative study of developed and developing countries. *International Journal of Manpower*, 43(7), 1587–1605. <https://doi.org/10.1108/IJM-09-2021-0516>
- Okonkwo, C., & Patel, A. (2021). Green skills development and social mobility: A pathway to sustainable livelihoods. *International Journal of Training and Development*, 25(3), 291–308. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12226>
- Patel, R., & Anderson, K. (2020). Integrating social justice concerns into green economic policies: A framework for analysis. *Ecological Economics*, 178, 106829. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106829>
- Rodrigues, C., & Almeida, J. (2022). Sustainable energy access and social inclusion: A gender perspective. *Energy Research & Social Science*, 90, 102587. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102587>
- Rodriguez, E., & Thompson, M. (2020). Sustainable consumption patterns and social equity: A comparative analysis. *Journal of Consumer Research*, 47(5), 618–636. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucaa034>
- Santos, F., & Turner, R. (2021). The role of community-based initiatives in promoting green economy and social justice. *Local Environment*, 26(5), 594–610. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1904858>
- Sharma, R., & Chen, L. (2023). Bridging the digital divide in the green economy: Implications for social equity. *Technological Forecasting and Social Change*, 186, 121998. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121998>
- Smith, J., & Johnson, E. (2020). Green economy and social inequality: Bridging the gap through sustainable development. *Sustainability Science*, 15(4), 1267–1279. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00814-w>
- sudrajat, D., & Moha, I. (2019). *Ragam penelitian kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jaxbf>

- Tanaka, S., & Patel, A. (2023). Green jobs and skills development: Implications for social equity and sustainable growth. *International Labour Review*, 162(1), 27–51. <https://doi.org/10.1111/ilr.12368>
- Taylor, M., & White, J. (2022). The intersection of environmental justice and the green economy: A systematic review. *Environmental Science & Policy*, 132, 44–54. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.02.002>
- Torraco, R. J. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.
- Torres, M., & Wilson, J. (2021). Sustainable tourism development and social equity: A case study of indigenous communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(11–12), 1764–1783. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1903019>
- Wang, L., & Brown, S. (2022). The role of green finance in promoting sustainable development and social justice. *Journal of Cleaner Production*, 330, 129751. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129751>
- Yamamoto, K., & Sato, M. (2022). The impact of green fiscal policies on income inequality: A meta-analysis. *Ecological Economics*, 196, 107397. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107397>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>